BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Maliki terhadap Iran

Komposisi penduduk Irak mencakup Syiah, Sunni dan suku Kurdi yang mencapai sekitar 14 persen dan tersebar di sebelah utara dan di dekat sumur minyak di dekat Kirkuk. Meskipun etnis Kurdi sudah menganut agama Islam, tetapi etnis Kurdi tetap mempertahankan identitas etnisnya. Selain etnis Kurdi, di Irak juga terdapat minoritas lainnya, yaitu orang-orang Turki, Iran, Turkman dan Assyiriah serta penganut agama Yahudi serta aliran keagamaan lainnya yang bertempat tinggal tersebar diseluruh negara atau terpusat di kota-kota. Diperkirakan penduduk Irak berjumlah 24 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3 persen. Baghdad sebagai kota terbesar dan ibukota negara berpenduduk 4 juta disusul oleh Basra dan Mosul. Secara umum, komposisi penduduk Irak terdiri dari beberapa kelompok etnis. Dua etnis terbesar adalah Arab Syiah (60 persen) yang bermukim di Selatan, etnis Arab Sunni (17 persen) di Tengah, dan etnis Kurdi yang bermazhab Sunni (23 persen) di Utara (Abud,2015:1-3).

Irak selama ini belum menikmati stabilitas, dan perang dianggap belum selesai. Pertentangan antara kubu politik Irak yang dilatar belakangi etnis dan mazhab menjadi bagian dari sistem perpolitikan Irak diantaranya :

1. Tumbangnya kekuasaan Saddam Hussein dan naiknya pemerintahan Maliki dipandang merepresentasikan kaum Syiah dalam perspektif ini adalah ‘Kebangkitan Syiah’ setelah berpuluh tahun berada di bawah kekuasaan Suni yang merupakan kelompok minoritas di Irak. Menurut Seyyed Vali Reza Nasr dalam kuncahyono, dalam konteks Dunia Syi’ah, ini merupakan ‘kebangkitan kedua Syiah’. Kebangkitan pertama terjadi dengan keberhasilan Revolusi Islam Iran pimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini pada 1979. Tetapi, berbeda dengan ‘kebangkitan kedua Syiah’ di Irak yang terjadi dalam konteks persaingan kekuasaan dengan kaum Suni, sebaliknya ‘kebangkitan pertama Syiah’ terjadi dalam pergumulan di antara kaum Syiah sendiri, dalam hal ini antara Ayatullah Khomeini versus penguasa Iran Syiah, Syah Reza Pahlevi, yang didukung AS. berkaitan dengan tumbangnya kekuasaan Suni yang dipegang Presiden Saddam Hussein. Bahkan, Seyyed Vali Nasr mengklaim, tumbangnya Saddam Hussein menghasilkan terbentuknya apa yang dia sebut sebagai ‘negara Syiah Arab’ pertama. Sebagai penduduk mayoritas Irak, kaum Syiah sejak pemilu pertama pada 2005 telah mendominasi lanskap politik Irak. Pemilu yang berlangsung hanyalah mengonfirmasikan dominasi Syiah dalam politik Irak sekarang(Kuncahyono,2005:14).

2. Sunni

Kaum sunni yang berkuasa pada masa Saddam Hussein pasca lengsernya Saddam Hussein dominasi kaum Sunni pun berakhir digantikan oleh Nouri al-Maliki yang berasal dari kelompok Syiah kelompok Sunni yang populasinya sekitar 20 persen dari penduduk Irak yang berjumlah 26 juta orang. kenyataan yang dihadapi bagi kaum Sunni yang telah berkuasa di Irak selama delapan dekade, termasuk di bawah rezim Saddam Hussein. Aliansi Irak Bersatu yang didominasi kelompok religius yang berhubungan erat dengan Iran dan didukung tokoh ulama Syiah, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, ini diperkirakan akan memenangi pemilu karena cukup mengantongi sedikitnya 50 persen dari total jumlah suara. Sejauh ini belum ada hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh provinsi Kurdi di utara atau dari provinsi yang dihuni mayoritas Sunni di provinsi utara dan barat dari Baghdad. Kemungkinan besar kaum Syiah akan berkoalisi dengan kaum Kurdi. Ini diyakini akan semakin meresahkan kaum Sunni. Sebagian besar kaum Sunni memboikot pemilu dan masih menyimpan kecurigaan besar terhadap perpolitikan Irak yang dituduh telah sengaja "membuka jalan" atas dominasi kekuasaan Syiah.

3. Kurdi

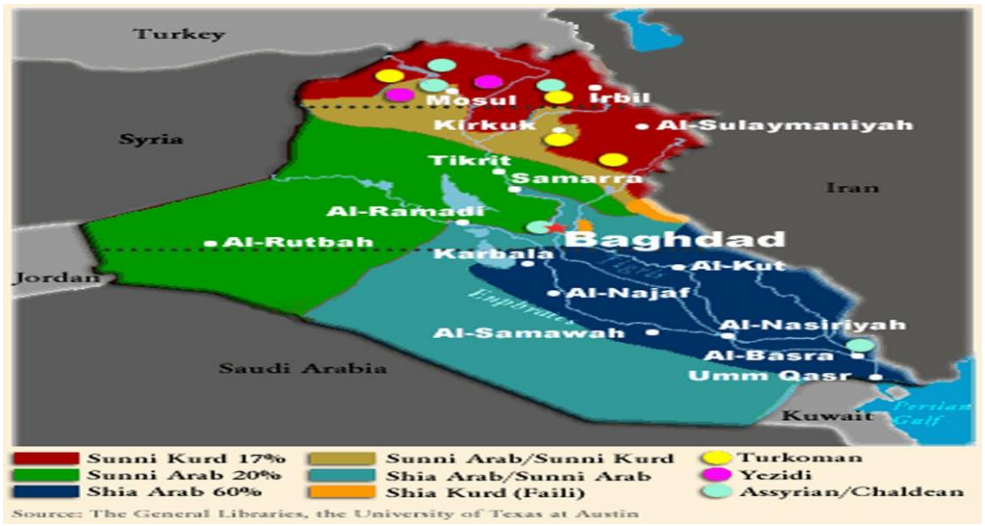
Suku Kurdi sebagai bagian dari rakyat Irak minoritas, sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan juga sering mengalami penindasan selama pemerintahan Saddam Hussein. Selama perjuangan menuntut kemerdekaan yang meletus menjadi perang, etnis Kurdi selalu menemukan jalan buntu. Hingga perjuangan bersenjata berubah menjadi perjuangan politik dan diplomasi pada tahun 1955, tetap saja etnis Kurdi menjadi sasaran kekejaman. Di mata dunia, etnis Kurdi merupakan potret etnis yang malang. Sedihnya lagi kepentingan etnis Kurdi sering diabaikan oleh pemerintah Irak, khususnya pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Akibatnya mudah ditebak, etnis Kurdi ingin memisahkan diri dari negara Irak lalu mendirikan negara Kurdi. Tentu saja keinginan tersebut dinilai sebagai gerakan separatisme, segera ditentang oleh pemerintah Irak. Bahkan tidak hanya ditentang, tetapi juga ditumpas. Itulah yang menyebabkan Saddam Hussein membumi hanguskan kawasan Utara yang didiami oleh etnis Kurdi, karena mereka dianggap sebagai separatisme yang dapat mengancam kesatuan Irak. Pasca lengsernya kekuasaan Saddam Hussein suku Kurdi mulai ikut masuk dalam pemerintahan Irak dan beraliansi dengan partai beraliran syiah untuk duduk dalam pemerintahan dan saat ini suku Kurdi memiliki kedudukan yang

sama dengan masyarakat Syiah dan Sunni Irak dalam perpolitikan Irak (Kuncahyono,2005:165).

Rosenau dalam Yani yang mengaitkan bahwa faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri (Rosenau dalam Yani,2010:4).Hal ini dapat mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain yang memiliki efek signifikan terhadap kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran pasca-invasi AS. Peneliti akan mencoba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Maliki terhadap Iran diantaranya:

4.1.1 Geopolitik Etnis di Irak

Di Irak, umat Syiah merupakan mayoritas atau sekitar 607% dari sekitar 25 juta penduduk Irak saat ini. Pada umumnya terkonsentrasi di kawasan Irak selatan dan timur seperti, Basra, Karbala, Diwaniyah, Hillah, 'Amarah, Muntafiq, Kut, Najaf, Kazimain, dan al-Thaurah. Karbala (tempat syahidnya Imam Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW) dan Najaf sangat dikenal sebagai kota-kota suci umat Syiah . Sementara kaum sunni menempati wilayah Irak selatan yang didominasi kelompok Arab.Sedangkan Kurdi sekalipun berafiliasi dengan mazhab Sunni dan Syiah namun sentimen kesukuan lebih menonol diantara etnis Kurdi.



Sumber: https://iraqcommunication.wordpress.com/team-report/chapter-3-minority-policy-in-iraq/ diakses pada 12 Desember 2014)

Gambar 4.1

Geopolitik Etnis Irak

Iran yang merupakan negara Syiah terbesar dikawasan timur tengah menganggap keamanan Iran selalu menghadapi tantangan yang cukup besar dari politik berdasarkan Etnis yang menjadi ciri pemerintahan yang ada di Irak. Selama puluhan tahun Pasca Kemerdekaan Irak, terjadinya ketegangan Etnis Kurdi, Sunni dan Syiah yang mendominasi Irak juga memiliki imbas bagi ketegangan ditingkat domestik maupun kawasan. Iran menganggap integritas teritorial Irak merupakan salah satu masalah keamanan Iran. Saat ini, tujuan utama kebijakan luar negeri Iran pasca-invasi Irak adalah untuk mempertahankan persatuan nasional Irak hal ini diperkuat dengan jutaan rakyat Irak berziarah ke beberapa tempat suci Syiah di Irak diantaranya Karbala, Najaf, Samarra,dan Kadimiyah, dimana bagi umat Syiah Irak adalah tanah suci kedua setelah Mekkah

dan Madinah di Saudi Arabia dan ketidakstabilan kondisi keamanan Irak akan mempengaruhi jutaan warga Iran yang mengunjungi Irak setiap tahunnya. Mengingat latar belakang sejarah dan ancaman dari Irak, Iran beranggapan bahwa Irak bisa saja menimbulkan ancaman strategis bagi Iran jika isu-isu politik yang terjadi di Irak tidak ditangani dengan hati-hati. Selain itu, meskipun faksi Syiah memiliki sikap yang berbeda dalam melakukan hubungan dengan Iran, semua Fraksi Islam Syiah di Irak sama-sama mencari dukungan atas Iran (Meisarah,2003:7).

4.1.2 Persaingan Regional

Iran dan Irak dianggap dua negara inti kawasan, kedua negara menjalankan kerjasama ekonomi, politik maupun budaya. Kekayaan sumber daya alam terutama minyak dan gas serta akses untuk mendapatkan jalur perdagangan diteluk persia telah menghasilkan persaingan, baik itu antar negara maupun di kawasan. Salah satunya bagaimana Irak dimasa Saddam Hussein menginvasi Iran atas perebutan sumber daya minyak di wilayah Khuzestan Iran dan akses perdagangan di Teluk Persia. Pasca runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein isu utama dari hubungan kedua negara adalah bagaimana menghilangkan isu persaingan menjadi isu kerjasama antara kedua negara. Selama beberapa tahun terakhir terutama pasca invasi AS ke Irak bagaimana pengaruh asing yang berada di Irak, terutama Amerika Serikat yang merupakan musuh politik Iran dikawasan , juga mempengaruhi hubungan luar negeri Irak terhadap Iran. Keberadaan

pangkalan militer AS di Irak dianggap sebagai ancaman langsung terhadap Iran. Disisi lain masalah persaingan yang terjadi di Irak tidak hanya terhadap Amerika dengan Iran melainkan juga antara Iran dan Arab Saudi yang menjadikan Irak sebagai medan bagi perebutan pengaruh antar kedua negara (Alisson,2001:6).

4.1.3 Rezim yang berkuasa di Irak

Irak menganut sistem Republik Parlementer dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan Etnis, Suku , dan Aliran Keagamaan di Irak seperti yang dianut oleh Lebanon. Di Irak kelompok Syiah yang mayoritas mendapatkan kursi kekuasaan sebagai Perdana Menteri, Kelompok Sunni mendapat kursi sebagai ketua Parlemen, sedangkan kelompok Kurdi mendapat kursi sebagai Presiden. Pasca runtuhnya Rezim Saddam Hussein, kelompok Syiah Irak yang berjumlah lebih dari 60 persen penduduk tampil memainkan peran politik penting di negara ini. Partisipasi luas warga Muslim Syiah dalam pemilu beberapa tahun terakhir dan dukungan para ulama terkait pengokohan proses politik di Irak membuat potensi dan peran mereka di gelanggang politik dan sosial semakin besar terhadap dominasi warga syiah.

Seperti yang pernah peneliti jelaskan pada Bab III sebelumnya di dalam sistem perpolitikan Irak terdapat pembagian kubu dan aliansi berdasarkan etnis dan mazhab yang terdapat di Irak diantaranya :

1. **Koalisi Nasional Irak *(Al-Itilaf al-Watani al-Iraqi)*** didirikan pada menghimpun 11 kekuatan politik. Di antara yang terpenting kekuatan

politik utama Syiah, seperti Dewan Tinggi Islam pimpinan Ammar al-Hakim, kubu Al Sadr pimpinan tokoh muda Syiah Moqtada al-Sadr, Partai Fadilah, Parti Dakwah sayap Ibahim Jaafari, Kongres Nasional Irak pimpinan Ahmed Chalabi, kubu Al Wasat pimpinan Mouafik Rubaie. Kubu ini dipimpin oleh kelompok ulama berpengaruh Irak yang sangat pro Iran Moqtada al-Sadr. Moqtada al-sadr sendiri merupakan pemimpin politik kaum Syiah berpengaruh dan memiliki ribuan milisi bersenjata yang mendapat dukungan dari Iran, dimana ribuan milisi ini juga berperan dalam memerangi pasukan pendudukan AS di Irak. Kelompok Moqtada al-sadr bertujuan mendirikan negara islam ala Iran di Irak.

2. **Koalisi Negara Hukum (*I'tilāf Dawlat al-Qānūn*)** didirikan oleh Nouri al-Maliki menghimpun 50 kekuatan politik dan sejumlah figur politisi dari kalangan Sunni. Beberapa yang terpenting adalah Partai Dakwah sayap Nouri al-Maliki, Persatuan Islam Turkman pimpinan Abbas al-Bayati, kubu Independen pimpinan Hussein Shaharastani, serta beberapa figur Sunni, Kristen, dan Syiah. Koalisi negara hukum pimpinan Maliki ini dianggap sebagai representasi kubu Syiah sekuler di Irak. Kubu ini menolak sistem politik ala Iran diterapkan di Irak namun berkeinginan menjaga hubungan baik dengan Iran. Kelompok ini juga mendapat dukungan dari ulama tertinggi Syiah berpengaruh Irak Ayatullah Ali Sistani yang memiliki pengaruh luas diantara

masyarakat Syiah Irak. Sekalipun berpaham sekuler namun kelompok ini juga mendapat dukungan dari Iran.

3. **Gerakan Nasional Irak (*Al-Haraka al-Wataniya al-Iraqiyya*)** menghimpun Gerakan Kerukunan Nasional pimpinan Iyad Allawi, Front Irak untuk Dialog Nasional pimpinan Saleh Mutlak, dan Perkumpulan Demokrat Independen pimpinan Adnan Pachachi. Gerakan Nasional Irak terakhir ini mendapat terpaan politik menyusul sejumlah tokohnya dilarang ikut pemilu oleh lembaga permasalahan dan keadilan karena dituduh memiliki hubungan dengan partai terlarang, Baath. Di antara tokoh yang dilarang ikut pemilu itu adalah Saleh Mutlak dan Dhafir al-Ani. Kelompok ini memiliki kedekatan politis dengan AS dan Arab Saudi dan sangat anti terhadap Iran serta menentang pengaruh politik Iran yang besar di Irak. Kelompok ini kerap menuding Iran sebagai dalang dari destabilisasi Irak karena dukungan Iran terhadap milisi Syiah di Irak. Kelompok ini juga mendapat dukungan kuat dari Arab Saudi.
4. **Kubu Kurdi (*Al-Ittihad Al-Watani Kurdistan)*** dimana terdapat empat kekuatan politik Kurdi di pentas politik Irak saat ini, yaitu Uni Patriot Kurdistan, Partai Demokrasi Kurditan , Uni Islami Kurdistan, dan Kubu Perubahan. Namun, yang menonjol adalah dua faksi politik klasik Kurdi, yaitu Partai Demokrat Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Uni Patriot Kurdistan pimpinan Jalal Talabani yang kini

menjabat Presiden Irak. Kelompok Kurdi ini juga mendapat dukungan dari Iran diantaranya Jalal Talabani yang mahir berbahasa Persia dan menjadikan Iran sebagai tempat perlindungan dimasa Saddam Hussein. Kelompok Kurdi sekalipun juga menganut Islam bermazhab Sunni dan Syiah namun mereka lebih mengutamakan ke etnisannya. Kelompok kurdi juga kerap memilih netral dalam kemelut politik antara kubu Syiah dan Sunni di Irak. Kelompok ini juga berpandangan menguatnya pengaruh Sunni maupun Syiah juga akan memiliki dampak yang tidak baik bagi warga Kurdi yang merupakan salah satu etnis di Irak (http://internasional.kompas.com/read/2010/03/06/03331996/Pentas.Politik.pada.Pemilu.Irak.2006 diakses pada 19 Mei 2014).

Pemilu Irak pada tahun 2005 berhasil memenangkan kelompok koalisi Negara Hukum pimpinan Nouri al-Maliki. Komisi Pemilihan Tinggi Independen Irak mengatakan Koalisi Negara Hukum dari Maliki memenangkan 92 kursi dari 328 kursi di parlemen. Koalisi ini memimpin 10 dari 18 provinsi, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Selasa (20/5). Kemenangan kubu Maliki ini dianggap sebagai representasi kemenangan kubu Pro Iran di Irak. Sejumlah delegasi Irak yakni Presiden Irak Jalal Talabani (Koalisi Kurdistan), Wakil Presiden Adel Abdel Mahdi (Koalisi Nasional Irak), Karar Al-Khofaji (Ketua kantor kubu Al Sadr yang pro-Iran), Hamam Hamudi dan Hadi al-Amiri (Majelis Tinggi Islam Irak), serta Abdel Halim al-Zuhairi (partai Dakwah) mengunjungi Iran usai dilaksanakannya pemilu legislatif Irak ditndai kemenangan kubu Maliki

(http://sains.kompas.com/read/2010/03/06/03331996/Pentas.Politik.pada.Pemilu.Irak.2010 diakses pada 19 Mei 2014)

Kemenangan kubu Maliki ini sudah diduga kuat sebelum pemilu. Skenario terkuat hasil pemilu adalah partai-partai politik loyalis Iran akan meraih mayoritas kursi parlemen. Partai loyalis Iran itu ialah partai Dakwah Islami, Dewan Tinggi Revolusi Islam Irak, dan kelompok Ahmed Chalabi yang baik tergabung dalam koalisi negara hukum pimpinan Maliki maupun kelompok politik syiah lainnya. Partai loyalis Iran tersebut pada pemilu parlemen ini mengajukan satu paket kandidat dengan nama Aliansi Irak Bersatu. Menurut Kallab, loyalis Iran akan memegang peran terbesar dalam penyusunan konstitusi nanti dan merancang format negeri Irak masa depan. Oleh karena itu, sikap politik Aliansi Irak Bersatu sebagai kelompok dominan dan dinilai pro-Iran bisa menjadi barometer tentang bagaimana format konstitusi baru dan kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran.

4.1.4 Kerjasama Keamanan Irak Iran

Perkembangan politik dan keamanan Irak pasca invasi AS menghadirkan tantangan keamanan baru dalam hubungan antara Irak dan Iran diantranya: Pertama kehadiran langsung pasukan AS di perbatasan Iran yang menjadi ancaman langsung terhadap Iran dan mempengaruhi hubungan Irak terhadap Iran. Semenjak dilengserkannya kekuasaan Saddam Hussein yang merupakan musuh bebuyutan Iran oleh AS walaupun Iran mengambil keuntungan dari keadaan

tersebut namun kebijakan regional pemerintahan AS yang difokuskan untuk mengisolasi Iran dalam bidang geopolitik dan keberadaan pangkalan AS di Irak juga menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan Irak terhadap Iran. Disisi lain pemerintahan Maliki memberikan jaminan terhadap Iran yaitu menolak negara manapun yang memakai wilayah Irak untuk melakukan serangan terhadap Iran (Vaezi,2010:9).

Kedua masalah kelompok teroris Iran yang bermarkas di Irak yang dinamakan *mujahidin khalq (MKO)* Kelompok ini didirikan 1965 dan beridiologi Islam-Marxis. Tokoh-tokoh pendiri Mujahidin di antaranya Mohammad Hanifnejad, Said Mohsen dan Ali Asqar. Pada awalnya kelompok ini mengusung tema anti imperialisme dan nasionalisme dalam ideologinya. Meskipun kelompok ini menolak disebut Islam-Marxis, mereka menerima beberapa pemikiran Marx yang dianggap seusai dengan gerakan mereka. Kelompok ini kerap melancarkan aksi pemboman ke dalam wilayah Iran dan berhasil membunuh petinggi petinggi politik Iran pasca revolusi islam. kelompok ini kemudian terusir dari Iran dan kemudian mendapat perlindungan dari Irak pada masa Saddam Hussein. Pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein dan naiknya pemerintahan Maliki memunculkan wacana untuk menutup markas besar kelompok ini di kamp al ashraf Irak karena keberadaan markas kelompok ini di Irak menjadi duri dalam daging bagi hubungan antara Irak dan Iran

4.1.5 Peluang Kerjasama Ekonomi Irak Iran

Tujuan lain dari kebijakan Irak terhadap Iran pada masa Maliki adalah untuk menciptakan peluang ekonomi budaya dan politik. Perdagangan Irak secara tradisional berorientasi ke dunia Arab melalui Yordania di barat dan Turki dan negara-negara Blok Soviet di utara. Pasca invasi AS ke Irak dan naiknya pemerintahan Maliki peluang Kerjasama Ekonomi kedua negara semakin meningkat. Irak selain memiliki perbatasan langsung yang memanjang dengan Iran juga memiliki kesamaan budaya. Iran yang memiliki populasi yang cukup besar menjadi pasar potensial bagi barang barang produksi Irak begitupun sebaliknya. Irak dan Iran yang merupakan negara penghasil energi minyak dan gas terbesar dunia menghasilkan kerjasama pembangunan pipa minyak dan gas bersama untuk di eksport ke Eropa yang meliputi Iran-Irak-Suriah-Lebanon.

Pada masa pemerintahan Maliki perdagangan antara Irak dan Iran mencapai nilai 16 milyar dolar dan nilai itu meningkat dari tahun ke tahun. Irak dan Iran juga berencana menggabungkan produksi minyak mereka. Kerja sama kedua negara tersebut sekaligus untuk memompa minyak mentah pada 2020 mendatang untuk menyaingi produksi minyak Arab Saudi. Gabungan antara Iran dan Irak jelas memiliki cadangan minyak lebih besar dibanding Arab Saudi, apalagi potensi bantuan investasi internasional untuk menyesuaikan kapasitas untuk memproduksi minyak yang saat ini berada di sekitar 12,5 juta barel per hari minyak mentah seperti yang disampaikan Deputi Perdana Menteri Irak dalam bidang Energi Hussain al-shahristani (http://www.voaindonesia.com/content/iran-

dan-irak-berencana-kerjasama-tingkatkan-produksi-minyak diakses pada 27 Maret 2015)

Iran juga kerap membantu pelatihan tentara Irak dalam kerjasama melawan terorisme, korupsi , serta rekonstruksi Irak pasca perang. perluasan kerjasama di sektor ekonomi khususnya di bidang infrastruktur dan tranportasi, rel kereta api, jalur laut dan udara serta proses rekonstruksi kerusakan Irak pasca perang.

4.2 Keterkaitan Krisis Politik Irak terhadap Kebijakan Luar Negeri Irak terhadap Iran

Peristiwa Arab Spring khususnya konflik Suriah memiliki dampak langsung dengan Irak yang berbatasan langsung dengan Suriah. Fenomena yang terjadi di Irak pada dasarnya apa yang terjadi di Irak merupakan bagian dari gejolak Arab Spring terutama konflik Suriah yang berbatasan langsung dengan Irak. Namun krisis politik yang terjadi di Irak telah berubah menjadi sangat kompleks dan melibatkan Aktor-Aktor Internasional, dalam hal ini negara-negara yang berebut pengaruh dan semakin memperumit situasi yang ada. Tidak ada sistem pemerintahan manapun di dunia yang sempurna, dalam hal ini 100% sepenuhnya di dukung oleh seluruh rakyatnya, maka krisis yang terjadi di Irak dapat dimaklumi. Rasanya mustahil jika ada sebuah rezim yang disukai oleh seluruh rakyatnya karena yang ada justru sekelompok orang yang berusaha mencari celah dan kecacatan rezim atau pemerintahnya yang berkuasa. Berarti hal

ini menunjukkan bahwa tidak hanya negara dan pemerintah saja yang memiliki kepentingan, setiap lapisan masyarakat pun memiliki kepentingan yang berbeda-beda maka wajar jika dalam suatu rezim terdapat pergolakan. Namun, yang penting adalah bagaimana rezim tersebut dapat menerima kritikan, mau mendengar, dan dengan terbuka mau menampung seluruh keluhan dari masyarakatnya yang protes. Menurut Dina Y Sulaeman minimalnya ada empat faktor yang terlibat dalam sebuah konflik, yaitu *triggers* (pemicu), *pivotal* (akar), *mobilizing* (peran pemimpin), dan *aggravating* (faktor luar yang memperburuk atau memperuncing situasi konflik) (Sulaeman,2013:5).

Dalam kasus Irak, akar permasalahan konflik bersumber dari ketidakpuasan masyarakat dengan pemerintahan yang diterapkan oleh Maliki di Irak yang dianggap cenderung meminggirkan kaum Sunni. Pemicu lain dari konflik Irak adalah isu sekterian yang mencuat kemudian pemicu krisis politik yang terjadi di Irak adalah imbas dari konflik Suriah sedangkan faktor yang memperburuk keadaan disebabkan ikut campurnya negara negara asing yang memiliki kepentingan di Irak. Selama ini banyak pihak yang memandang krisis politik di Irak merupakan masalah antara mazhab dan etnis yang hidup di Irak. Peneliti merangkum berbagai peristiwa yang menunjukkan krisis politik yang terjadi Irak. Dimana dalam memandang konflik Suriah Iran memiliki pandangan yang sama-sama yaitu mendukung rezim Suriah Bashar al-assad melawan rezim oposisi. Rezim pemerintahan Irak yang ditinggalkan Amerika lebih "condong" ke Iran dari pada Amerika, dan itu terbukti dengan sikap Irak yang mendukung rezim

Bashar al Assad di Syria yang merupakan sekutu terdekat Iran. Kedekatan yang terjalin antara Maliki dan Iran juga disebabkan karena Maliki pernah menetap di Iran saat Saddam Hussein berkuasa. Maliki pun dinilai cukup toleran dengan Iran yang menggunakan wilayah udara Irak untuk mengirim senjata ke pemerintahan Suriah. Sekaligus membantu Iran dalam mengirimkan milisi Syiah untuk membantu pemerintah Suriah memerangi oposisi

4.2.1 Konflik Sekterian

Pemerintahan Saddam Hussein tumbang pada tahun 2003 karena invasi Amerika, tetapi baru pada 2008, Irak memulai pemerintahan sipil yang pemimpinnya berasal dari warga mayoritas, Syiah. Selama era Saddam, mayoritas pejabat pemerintahan, termasuk pemegang kekuasaan tertinggi berasal dari kaum Sunni yang merupakan minoritas. Namun, sejak dipegang kelompok mayoritas, kekerasan sektarian terus terjadi karena warga Sunni, yang terbiasa mendapat porsi terbesar sebagai pemegang kekuasaan, tidak bisa menerima diperintah kelompok Syiah yang sebenarnya adalah mayoritas di Irak. Apalagi sejak Irak merdeka, kekuasaan selalu dipegang warga Sunni dan baru beralih ke Syiah sejak pemerintahan Saddam Hussein tumbang.

Irak dilanda aksi kekerasan sekterian serta ledakan bom berdarah di masa kepemimpinan Maliki. Ledakan bom di Irak menargetkan warga syiah yang berziarah ke tempat suci di Irak seperti Karbala, Najaf dan Samarra. Irak dihadapkan dengan berbagai krisis politik berkepanjangan atas isu-isu riil seperri

pembagian kekuasaan dengan batas teritorial. Kekerasan di Irak telah meningkat sejak awal tahun, bertepatan dengan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan Sunni Irak yang meletus menjadi protes pada akhir Desember terhadap pemerintahan Maliki. Ancaman perang sektarian meningkat diperdalam oleh ketakutan di kalangan elit Syiah Irak bahwa gerakan Kebangkitan Arab berubah menjadi perang anti-Syiah.



Sumber : http://liputanislam.com/traveling/menembus-kota-suci-irak/ diakses pada 12 Desember 2014)

Gambar 4.2

Pemboman tempat suci kaum Syiah, Mesjid Imam Ashkari di Samarra

Pejabat Intelijen mengatakan bahwa masalahnya adalah keamanan Irak hanya bereaksi terhadap peristiwa dan tidak memiliki strategi jangka panjang. Krisis kekerasan dan politik terbaru dipicu oleh surat perintah penangkapan untuk Hashemi terutama untuk mendestabilisasi Irak karena konfrontasi Sunni-Syiah meningkat di seluruh dunia Muslim (Alisson,2001:21)

Kondisi keamanan di Irak dipengaruhi banyak faktor, di antaranya adalah gerakan bawah tanah Partai Baath, kelompok teroris seperti Al-Qaeda serta petualangan pihak-pihak asing. Irak memandang Penangkapan puluhan teroris yang memiliki kewarganegaraan dari berbagai negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania membenarkan hal ini bahwa Irak saat ini menjadi korban konspirasi dari sejumlah negara Arab. Selain itu, dampak dari krisis Suriah bagi Irak pun tak boleh dilupakan terutama dalam kebijakan Maliki yang mendukung presiden Suriah Bashar al Assad. Iran yang mayoritas penduduknya memeluk Syiah, adalah pendukung pemerintahan Maliki, seorang politisi Syiah yang pernah mengasingkan diri di Iran saat Saddam Hussein berkuasa di Irak. Iran juga menggunakan wilayah Irak untuk menerbangkan pasokan bantuan ke Presiden Suriah Bashar al-Assad. Selain itu, ribuan pejuang gerilyawan asal Iran juga menyeberang ke suriah melalui Irak untuk membantu pemerintah assad melawan pemberontak . Iran juga kerap memakai wilayah udara Irak untuk mengirimkan pasokan senjata ke suriah membantu pasukan pemerintah suriah melawan kelompok oposisi. Iran berkepentingan dengan stabilitas Irak. Sebab, instabilitas di Irak telah banyak menimbulkan kerugian bagi Iran, terutama di wilayah perbatasan maraknya perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan aksi-aksi terorisme dari kelompok-kelompok anti-Iran di Irak. Iran mendukung pemerintahan Maliki sekaligus menginginkan AS segera hengkang dari Irak (Alisson,2001:22).

4.2.2 Terorisme

Di Irak, situasi keamanan masih memprihatinkan. Tingkat jaminan keselamatan yang disediakan polisi bagi penduduknya jauh dari harapan. Pada 2014 lebih dari 5000 orang tewas akibat serangkaian serangan. Setelah pengadilan memvonis hukuman mati *in absentia* pada wakil presiden Tarek al Hashemi, teroris meledakan bom di kota-kota. Terorisme di Irak meningkat, sejak pertikaian kaum sunni dan syiah semakin memanas. Kekerasan ynag berlangsung di bulan Ramadhan menunjukan kuatnya kelompok-kelompok teroris. Di samping gerakan organisasi internasional Al-Qaedah, kelompok non-fundamentalis pun bergerak. Di luar itu, lewat aksi kekerasan, kelompok radikal Sunni, Syiah dan Kurdi, juga memperluas pengaruh politiknya.

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) melaporkan bahwa jumlah warga sipil yang meninggal adalah 1.186 (termasuk 106 polisi sipil). Sedangkan jumlah warga sipil yang terluka adalah 1.511 (termasuk 177 polisi sipil). Badan itu juga menyebutkan bahwa 551 anggota Pasukan Keamanan Irak, termasuk pasukan dari Peshmerga dan SWAT, meninggal, dan sebanyak 467 orang luka-luka. Namun angka itu tidak termasuk korban dari operasi Anbar, Baghdad adalah wilayah negara itu yang terkena dampak terburuk dalam kekerasan dan aksi teroris di Irak, dengan 1.035 orang sipil menjadi korban. Sebanyak 415 meninggal, dan 620 luka-luka akibat aksi terorisme di Irak (https://www.iraqbodycount.org/database/ diakses pada 8 januari 2015).



Sumber: http://www.bagnewsnotes.com/2007/04/and-then-there-was-iraq/ diakses pada 12 Desember 2014)

Gambar 4.3

Pemboman di Baghdad yang menargetkan warga sipil tahun 2007

Salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan adalah disintegrasi kelompok-kelompok di Irak. Sunni, Syiah dan Kurdi menjadikan Irak kota yang berdarah. Permasalahan ini berdampak besar pada Irak di berbagai segi, baik politik, ekonomi dan sosial. Bahkan dalam bulan Juli ini (hingga 13 Juli 2013), serangan-serangan terhadap tempat keramaian terus terjadi yang menelan korban 184 warga sipil yang tewas. Ancaman terorisme menjadi masalah utama keamaanan Irak terhadap Iran. Bagi Iran Irak merupakan tempat suci setelah Mekkah dan Madinah di Saudi Arabia dimana di Irak terdapat makam makam imam suci bagi kelompok syiah . Aksi terorisme yang menargetkan tempat-tempat suci bagi umat muslim syiah menjadikan Irak sebagai prioritas keamanan Iran disisi lain jutaan rakyat Iran yang berziarah ke Irak sering dijadikan sasaran penyerangan oleh kelompok teror di Irak menjadikan Irak sebagai prioritas keamanan Iran.

4.1.3 Konflik Etnis Irak

Konflik Etnis di Irak memiliki keunikan tersendiri, di mana konflik yang terjadi di Irak merupakan kompleksitas antara faktor-faktor Internal Irak dan juga intervensi dunia internasional. Secara Internal. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik-konflik di Irak adalah aktor-aktor yang mewakili masing-masing identitas kelompoknya, baik dari suku, politik, daerah maupun aliran agama. Sementara itu, pengaruh yang berasal dari dunia internasional datang dari Amerika Serikat dan sekutunya. Konflik Etnis yang terjadi di Irak berakar pula dari kuatnya fragmentasi masyarakat baik secara kesukuan, ideology maupun aliran agama. Irak terpecah-pecah atas suku Kurdi, Arab, dan Turkmen, adapula kelompok Islam Syiah dan Islam Sunni, ada juga kelompok-kelompok yang berlatar belakang Ideologi Sosialis, Islam, *Pan-Arabisme* dan *Pan Islamisme*. Kelompok-kelompok tersebut saling berkonflik dengan tujuan mendapatkan pengakuan identitas kelompoknya, identitas politik maupun dalam motif ekonomi seperti mendapatkan pekerjaan dan sumber daya alam. Menurut Collier dan Hoeffler dalam Sa'ad menyatakan situasi yang paling mudah memicu konflik adalah saat dua kelompok suku utama bersaing untuk memperoleh kekuasaan (Sa'ad, 2007: 125).

Seperti halnya Konflik Etnis yang terjadi di Irak adalah suku-suku dan kelompok-kelompok masyarakat saling berkonflik satu sama lain untuk memperjuangkan identitas politiknya yang kemudian akan berujung pada kekuasaan. Konflik Etnis yang semakin intens terjadi di Irak hingga sekarang

dipengaruhi oleh dua faktor penting. Faktor pertama adalah ketidakbiasaan kelompok Islam Sunni terutama pendukung setia Saddam Husein untuk menerima kenyataan bahwa sekarang mereka tidak lagi memiliki kekuasaan pasca naiknya Maliki.

Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya rekonsiliasi nasional di mana tidak ada pengampunan bagi Saddam Husein dan juga para pengikut setianya. Hukuman mati bagi Saddam Husein telah berimplikasi pada semakin kerasnya aksi-aksi kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah yang sekarang ini sedang berkuasa. Faktor kedua adalah adanya campur tangan pihak asing sepertinya Amerika Serikat dan Iran dalam kehidupan politik dan keamanan di Irak. Di Irak tindak kriminal semakin meningkat, banyak terjadi aksi-aksi perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat, dan banyak pula aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa kelompok seperti kelompok Syiah pimpinan Muqtada al-Sadr yang mendapat dukungan Iran, perlawanan di kota-kota di segitiga Sunni, seperti Mosul, Tikrit, Baghdad, Samara, Kirkuk, Basaji, Ramadi dan Baquba.

Paska pembentukan pemerintahan baru oleh Maliki setelah pemilu pun terjadi ledakan bom yang meluluh lantahkan dinding masjid Asykariyah atau masjid emas di Samarra, masjid ini merupakan salah satu tempat suci kaum Syiah di Irak. Di masjid ini pula 12 imam yang sangat dihormati kaum Syiah dimakamkan. Serangan-serangan ini mengakibatkan terjadinya perang saudara dengan isu sectarian Sunni-Syiah. Paska pengeboman tersebut, 120 orang Sunni tewas sebagai reaksi balasan

Irak saat ini sudah kehilangan *mutual trust* antara mayoritas Syiah di satu pihak dan otoritas Amerika, dewan pemerintahan Irak sementara, serta kekuatan politik Iran lainnya, seperti Sunni dan Kurdi di pihak lain. Memang bisa dipahami jika melihat hasil pemilu Desember lalu yang relatif memposisikan kelompok Syiah lebih beruntung secara politik. Sementara itu, partai Sunni (Front Perdamaian Nasional) hanya meraih 44 kursi dan Front Dialog Nasional pimpinan politikus Sunni Saleh al-Motlak mendapat 11 kursi (http://www.nytimes.com/2005/12/21/international/middleeast/21iraq.html?pagewanted=all&_r=0 diakses pada 22 Desember 2014)

Golongan Sunni yang secara tradisional mendominasi politik di era Saddam merasa terancam dengan konstelasi baru pasca naiknya Maliki. Belum lagi, dengan sistem federal, penguasaan kaum Sunni di daerah Irak tengah tidak menghasilkan minyak yang begitu berarti bila dibandingkan dengan di bagian selatan dan utara Irak yang dikuasai kaum Syiah dan Kurdi. Sekarang kelompok Syiah hampir mendominasi segala aspek bernegara baik eksekutif, legislative, maupun militer. Pada konflik horizontal di Irak, pemimpin Syiah yang paling dihormati Irak, Ayatullah Ali al-Sistani, memberikan instruksi kepada pengikutnya untuk tidak melakukan serangan terhadp masjid-masjid Sunni, sehingga konflik yang terjadi antara Sunni-Syiah dapat sedikit diredam. Masalah keamanan yang tengah menerjang Irak, turut menjadi perhatian Iran. Iran kerap menyatakan solidaritas yang terjad di Irak. Iran dan Irak bukan hanya dua negara yang berbatasan namun memiliki keterkaitan sejarah, kebudayaan, tradisi dan

agama yang sangat erat. Terlebih lagi kedua negara ini memiliki peran besar dalam Sejarah Islam (Alisson,2001:26).

4.2.4 Separatisme Kurdistan

Masalah lain yang dialami Irak pada masa Maliki adalah isu separatisme wilayah otonomi Kurdistan. Sebagai kelompok etnis minoritas terbesar di Irak, suku Kurdi menguasai hampir seperlima wilayah di Irak. Etnis Kurdi memiliki cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara hal ini telah muncul sejak zaman kepemimpinan Saddam Hussein.



Sumber : https://vasanthseshadri.wordpress.com/2008/02/ diakses pada 12 Desember 2014).

Gambar 4.4

Wilayah Kurdistan di Kawasan Timur Tengah

Komposisi penduduk Kurdi yang mencapai 14 persen tersebar di sebelah utara dan di dekat sumur minyak di dekat Kirkuk. Meskipun etnis Kurdi sudah menganut agama Islam baik itu Sunni maupun Syiah, tetapi Etnis Kurdi tetap mempertahankan dentitas Etnisnya.

Etnis Kurdi mempunyai cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara Kurdistan Merdeka, itulah impian dan cita-cita dari etnis Kurdi. Keinginan untuk merdeka, lepas dari kekuasaan Baghdad sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan etnis Kurdi. Merdeka dan berdaulat penuh sebagai bangsa adalah tujuan perjuangan etnis Kurdi selama berpuluh-puluh tahun. Pada pemilu 30 januari 2006 keikutsertaan etnis Kurdi di wakili oleh dua kelompok utama, yaitu Partai Demokrasi Kurdistan pimpinan Massoud Barzani dan Persatuan Demokrasi Kurdistan pimpinan Jalal Talabani. Pelaksanaan Pemilu ini merupakan suatu momen kebangkitan kelompok Kurdi yang selama pemerintahan Saddam Hussein merupakan kelompok yang selalu ditindas dan didalam pemerintahannya kelompok Kurdi tidak pernah diikutsertakan. Pada masa kepemimpinan Maliki Kurdistan mendapatkan status wilayah semi otonom dengan Masooud Barzani sebagai Presiden nya. Kurdistan menikmati perubahan dengan mengurus sendiri pemerintahannya, serta menikmati petro dolar (ekonomi minyak) dari bumi mereka. Kurdistan, sebagai negara *de facto* yang tidak diakui siapa pun, menjadi surga bagi para penyelundup, pangkalan ideal bagi para pedagang yang membawa barang-barang ke dan dari Irak selatan, Iran, Turki, dan Suriah, dengan banyak peluang untuk memperoleh keuntungan bagi wilayah Kurdistan Irak http://www.hrw.org/news/2015/02/25/iraqi-kurdistan-arabs-displaced-cordoned-detained diakses pada 12 januari 2015)

Pasca kondisi ketidakstabilan politik yang melanda Irak. Pemimpin Kurdistan menyalahkan Maliki sebagai penyebab ketidakstabilan politik Irak

karena menerapkan politik sekterian. Massoud Barzani sebagai pemimpin Kurdistan juga menyerukan Referendum demi membentuk negara Kurdistan merdeka lepas dari pemerintahan pusat di Baghdad. Seruan Referendum Kurdistan mendapat penolakan dari pemerintah pusat di Baghdad. Konflik antara Pemerintahan Kurdistan meningkat setelah klaim Barzani atas wilayah Kirkuk yang kaya minyak menjadi wilayah bagian otonomi Kurdistan.

Iran sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Irak menolak kemerdekaan Kurdistan dan mengecam pemimpin Kurdistan Massoud Barzani yang menginginkan mendirikan negara merdeka terpisah dari pemerintahan pusat di Baghdad. Iran berusaha menjadi mediator konflik Irak Kurdistan. Bagi Iran kemerdekaan Kurdi adalah ilegal dalam hal ini Iran mendukung persatuan Irak. Iran meyakini Kemerdekaan Kurdistan akan berpengaruh terhadap stabilisasi wilayah Iran yang dihuni warga kurdi yang berbatasan langsung dengan Irak.

Iran memandang krisis politik yang terjadi di Irak adalah puncak dari akibat invasi Amerika serikat ke Irak dan meningkatnya isu sekterian di Irak. Selain itu faktor yang memperburuk keadaan Irak menurut Iran adalah ikut campurnya negara Asing dalam kemelut perpolitikan di Irak.

Penerimaan Arab Saudi terhadap kunjungan Wapres Irak Tariq Hashemi yang divonis hukuman mati memperkeruh hubungan Irak Arab Saudi dan semakin meningkatkan isu sekterianisme di Irak. Iran juga mengecam Turki karena melindungi Tariq Hashemi dan menolak untuk mengembalikannya ke Irak. Iran

berkali-kali menyerukan dialog nasional Irak untuk memecahkan kebuntuan politik Irak. Disisi lain kedekatan Irak dengan Iran mengancam pengaruh Saudi di Irak. Pengaruh Iran di Irak juga terlihat saat kemelut politik diantara kelompok Syiah antara kubu Maliki dan kubu Moqtada al-sadr namun hal itu dapat terselesaikan melalui mediasi Iran ditandai dengan bersedianya Moqtada al-sadr untuk keluar dari Irak dan menetap sementara di Iran (Kashoogi,2001:6)

4.3 Kepentingan Iran di Irak

Iran merupakan negara tetangga yang juga sekaligus sekutu Irak. Mayoritas penduduk di kedua negara tersebut berpaham Syiah. Iran adalah pemenang dari Perang Teluk II antara sekutu melawan rezim Saddam Hussein di Irak kembali terbukti. Rezim pemerintahan Irak yang ditinggalkan Amerika lebih "condong" ke Iran dari pada Amerika, dan itu terbukti dengan sikap Irak yang mendukung rezim Bashar al Assad di Syria yang merupakan sekutu terdekat Iran. Kedekatan yang terjalin antara Maliki dan Iran juga disebabkan karena Maliki pernah menetap di Iran saat Saddam Hussein berkuasa. Maliki pun dinilai cukup toleran dengan Iran yang menggunakan wilayah udara Irak untuk mengirim senjata ke pemerintahan Suriah . Di samping itu, pengaruh AS di Irak belakangan ini mulai berkurang memberikan peluang semakin menguatnya pengaruh Iran di Irak. Maliki yang merupakan politisi Syiah justru membangun hubungan yang baik dengan Iran yang dijatuhkan sanksi ekonomi oleh AS. Bersamaan dengan itu, Maliki memandang kejatuhan Bashar al Assad di Suriah menandakan adanya

kebangkitan pemerintahan Sunni dan Kurdi di Timur Tengah. Beberapa negara yang mendukung kejatuhan Assad seperti Arab Saudi, Qatar dan Turki, juga memiliki hubungan yang buruk dengan Maliki.

Iran menganggap Baghdad adalah teman dekat. Kepentingan Iran di Irak banyak dan didorong oleh kepentingan strategis, agama, dan pribadi. Iran ingin mempertahankan stabilitas Irak sebagai sekutu terdekat kedua setelah Suriah. Iran ingin mempertahankan pengaruhnya di Irak dan hubungan dekat melalui pimpinan di Baghdad. Iran memiliki kepentingan untuk melindungi peziarah Iran di Irak, investasi pemerintah Iran yang didominasi di selatan Irak. Iran juga mengutamakan keamanan kota kota suci bagi kelompok Islam Syiah seperti Karbala, Najaf, Samarra, Qadimiyah yang sering dijadikan target serangan oleh Kelompok Militan Sunni (Heydemann,2003:2)

Kunjungan berulang kali Maliki ke Tehran beberapa waktu menunjukkan Irak mementingkan hubungan Irak-Iran. Irak menjalin kerjasama politik, ekonomi ,dan militer dengan Iran yang selama ini terkena embargo militer AS. Irak tidak saja mementingkan masalah keamanan negara sendiri, tapi juga sangat mementingkan masalah keamanan Iran. Irak tidak mengizinkan wialayahnya dijadikan sebagai plaform yang merusak kepentingan Iran dan negara tetangga lainnya. Maliki menekankan pula, persetujuan mengenai kedudukan penempatan tentara yang akan ditandatangani Irak dan AS tidak akan merusak kepentingan Iran. Irak dan Iran menandatangani memorantum pengertian yang bertujuan meningkatkan kerja sama militer antara kedua negara. Menteri pertahanan kedua

negara menyatakan keinginan meningkatkan kerja sama militer bilateral, dan berpendapat memperkukuh dan mengembangkan hubungan kerja sama militer antara kedua negara akan menguntungkan perdamaian dan stabilitas regional, setelah itu, kedua pihak menandatangani memoratorium keamanan kedua negara (Kashoogi,2001:4)

Memoratorium itu menunjukkan , Iran dan Irak akan berdasarkan prinsip umum pengembangan hubungan secara menyeluruh antara kedua negara meningkatkan kerja sama militer, untuk mendorong lebih lanjut perdamaian dan stabilitas regional. Maliki mendapat dukungan kuat pihak Iran kepada masalah keamanan dan pembangunan kembali Irak. Kedekatan antara pemerintahan Maliki dan Iran diperkuat dengan sebanyak 5.000 warga Iran bersumpah untuk mempertahankan situs-situs suci Syiah di Irak dari serbuan kelompok militan Sunni yang mengobarkan perang terhadap Pemerintah Baghdad Bagi mereka yang mendaftarkan diri akan dimasukkan ke dalam unit-unit dan saat perintah diberikan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, mereka akan berangkat ke Irak untuk melindungi tempat-tempat suci kaum Syiah. Keinginan warga Iran membantu Pemerintah Irak ini menyusul fatwa ulama Syiah Ayatollah Ali al-Sistani yang mengajak warga Irak untuk mengangkat senjata untuk melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Iran yang mayoritas penduduknya memeluk Syiah, adalah pendukung pemerintahan Maliki, seorang politisi Syiah yang pernah mengasingkan diri di Iran saat Saddam Hussein berkuasa di Irak. Iran juga menggunakan wilayah Irak

untuk menerbangkan pasokan bantuan ke Presiden Suriah Bashar al-Assad. Selain itu, ribuan pejuang gerilyawan asal Iran juga menyeberang ke Suriah melalui Irak untuk membantu pemerintah assad melawan pemberontak . Iran juga kerap memakai wilayah udara Irak untuk mengirimkan pasokan senjata ke Suriah membantu pasukan pemerintah Suriah melawan kelompok oposisi. Iran berkepentingan dengan stabilitas Irak. Sebab, instabilitas di Irak telah banyak menimbulkan kerugian bagi Iran, terutama di wilayah perbatasan maraknya perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan aksi-aksi terorisme dari kelompok-kelompok anti-Iran di Irak. Iran mendukung pemerintahan Maliki sekaligus menginginkan AS segera hengkang dari Irak.

Dalam bidang Ekonomi perdagangan antara Irak dan Iran mencapai nilai 16 milyar dolar dan nilai itu meningkat dari tahun ke tahun. Irak dan Iran juga berencana menggabungkan produksi minyak mereka. Kerja sama kedua negara tersebut sekaligus untuk memompa minyak mentah pada 2020 mendatang untuk menyaingi produksi minyak Arab Saudi. Gabungan antara Iran dan Irak jelas memiliki cadangan minyak lebih besar dibanding Arab Saudi, apalagi potensi bantuan investasi internasional untuk menyesuaikan kapasitas untuk memproduksi minyak yang saat ini berada di sekitar 12,5 juta barel per hari minyak mentah seperti yang disampaikan Deputi Perdana Menteri Irak dalam bidang Energi Hussain al-shahristani. Iran juga kerap membantu pelatihan tentara Irak dalam kerjasama melawan Terorisme, Korupsi , serta Rekonstruksi Irak pasca perang (Mikati,2008:21)

Kepentingan nasional yang bersifat vital berkaitan dengan eksistensi negara dalam percaturan politik dunia. Selain itu juga menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayahnya serta pengaruh negara satu terhadap negara lainnya.

Strategi politik luar negeri Iran dalam menggapai tujuan diantaranya adalah persatuan dunia Islam . Ketika Iran melakukan aktifitas internasional di Dunia Islam, dan juga mendukung gerakan gerakan Islam perlawanan di Irak yang akan menjadi simbol kekuatan Iran di Irak. Iran yang memiliki basis idiologi di Irak melalui milisi milisi bentukan Iran menjadi pendukung kepentingan nasional Iran di Irak. Melalui basis dukungan di Irak ini, Iran bisa menggunakan dukungan tersebut untuk kepentingan Iran kapan saja jika Iran menghendaki, atau ketika suatu saat Iran menghendaki Milisi Syiah bentukan Iran untuk menyerang kepentingan negara yang memiliki permusuhan dengan Iran.

Iran merupakan Negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap percaturan politik Irak terlebih terhadap milisi Syiah di Irak. Sebagai negara Syiah terbesar didunia, Iran berhasil menanamkan pengaruhnya kepada Irak khususnya milisi Syiah. Hal tersebut terlihat dari dukungan Iran ketika tentara Mahdi pimpinan Moqtada al Sadr berkonflik dengan Amerika dikawasan Irak Selatan. Dukungan Iran juga terlihat ketika Iran membantu mempersenjatai dan mendanai milisi Syiah Irak untuk memerangi pasukan Amerika di Irak. Milisi Syiah bentukan Iran dianggap sebagai kepanjangan tangan Iran di Irak. Milisi Syiah bentukan Iran mengisi kekosongan Irak pasca ditariknya pasukan AS dari Irak. Keberhasilan milisi Syiah mengusir tentara AS dari Irak merupakan kekuatan

Proxy war militer Iran melawan AS di Irak. Menurut pakar politik Noam Chomsky terdapat puluhan milisi Syiah di Irak yang dilatih oleh pasukan Quds Iran dan beberapa diantaranya berkeinginan menerapkan sistem pemerintahan ala Iran di Irak beberapa milisi bentukan Iran diantaranya *Hizbullah khataib Irak, organisasi Badr, Saraya al-Difa 'abu-Sha'abi, Saraya al-Khorasani, Kata'ib Sayyid al-Shuhada, dan Harakat al-Nujaba.* Perkembangan milisi Syiah Iran menunjukkan *proxy* Iran sebagai pemain berpengaruh di Irak (Sa'ad,2007:31).

Melihat situasi diatas peneliti melihat perkembangan keamanan Irak di masa mendatang Iran memanfaatkan milisi-milisi bentukannya sebagai penjaga kepentingan Iran di Irak. Selain itu peran Iran di Irak merupakan bagian dari eksport idiologi pemimpin revolusi islam Iran keseluruh masyarakat Timur Tengah. Pemimpin kedua negara juga rutin mengadakan pertemuan untuk memperluas kerjasama kedua negara. Para pemimpin Irak kerap Menjadikan Iran sebagai negara pertama dalam kunjungannya ke luar negeri. Irak juga menjawab kekhawatiran Iran atas markas pasukan AS yang berada di Irak dan menjamin Iran bahwa tidak ada negara manapun yang diperbolehkan melakukan serangan ke Iran dari wilayah Irak. Maliki menjamin persetujuan mengenai kedudukan penempatan tentara yang akan ditandatangani Irak dan AS tidak akan merusak kepentingan Iran.

Dalam artian, kecenderungan, kesamaan, kepentingan keamanan dan ekonomi kedua negara bertetangga Iran-Irak ini saling berkaitan. Hubungan Iran dan Irak terjalin dengan baik pasca invasi AS meruntuhkan rezim Saddam

Hussein yang merupakan musuh utama Iran. Selain itu Irak membutuhkan Iran sebagai negara *super power* di tingkat regional. Kebijakan pemerintahan Maliki untuk merapat ke Iran memberikan dampak pada kekhawatiran negara Arab sunni akan menguatnya pengaruh Iran di Irak. Iran menganggap Irak penting karena kekayaan sumber minyak Irak dan kesamaan idiologi Irak dengan Iran merupakan hal yang patut diperhitungkan Selain itu, perlu juga diingat bahwa Irak merupakan negara tetangga terdekat Iran yang dari dan di mana ancaman bagi Iran berasal dalam hal ini keberadaan pangkalan militer AS di Irak sebagai sumber Ancaman bagi Iran.

Senada dengan diatas pada dasarnya kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran di bawah pemerintahan Maliki tidak berbeda dengan pemerintahan ibrahim jaafari sebelumnya, kebijakan luar negeri Irak di bawah pemerintahan Jaafari dinilai berusaha menjadikan Iran sebagai sekutu dan menganggap Iran sebagai negara terpenting bagi Irak. Pemerintahan Maliki mengakui pengaruh Iran yang cukup kuat di Irak, Pada masa pemerintahan Maliki perkembangan konstelasi politik keamanan Timur Tengah mengalami perubahan yang drastis. Kebijakan luar negeri Irak berpijak pada kedekatannya dengan Amerika namun tetap menjaga keseimbangan hubungannya dengan Iran. Maliki memilih tiga pendekatan yakni menjaga keseimbangan hubungan dengan AS yang merupakan musuh politik utama Iran dikawasan diantara keterikatan dengan Iran, dan keterikatan dengan PBB dengan melakukan pendekatan multilateral.